PERKUAT PENGELOLAAN PENGADUAN, OMBUDSMAN BABEL LANJUTKAN KOLABORASI DENGAN KANWIL ATR/BPN

Kamis, 26 November 2026 - kepbabel

PANGKALPINANG - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melanjutkan kolaborasi dengan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memperkuat pengelolaan pengaduan masyarakat. Hal tersebut dibahas dalam koordinasi yang berlangsung di Kantor Wilayah ATR/BPN, Rabu (25/11/2026).

Koordinasi diterima oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Anggun Mahirinna bersama Kepala Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat, Sarman P Sagala. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kegiatan *Focal Point* Ombudsman Babel melalui Kelas Pengaduan Sesi I dan II yang sebelumnya melibatkan seluruh Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil ATR/BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Salah satu agenda pembahasan adalah persiapan Kelas Pengaduan Sesi III dengan tema Evaluasi Pengaduan. Sesi ini melanjutkan pembahasan mengenai pentingnya pengelolaan pengaduan serta tahapan penerimaan dan penanganannya yang telah disampaikan pada dua sesi sebelumnya.

Melalui sesi lanjutan ini, peserta diharapkan mampu mengevaluasi pengelolaan pengaduan yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi kendala, serta menilai efektivitas tindak lanjut pengaduan sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan.

Plt Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kgs. Chris Fither, menyampaikan bahwa pengelolaan pengaduan tidak cukup hanya dengan menyediakan saluran pengaduan dan menerima keluhan masyarakat. Penyelenggara pelayanan publik juga perlu memastikan pengaduan ditindaklanjuti dan dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi.

"Pengaduan masyarakat merupakan sumber informasi penting bagi penyelenggara pelayanan publik untuk mengetahui kekurangan, mengidentifikasi persoalan, sekaligus melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan," ujarnya.

Pihak Kanwil ATR/BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut baik rencana pelaksanaan Kelas Pengaduan Sesi III. Ombudsman Babel berharap kegiatan ini dapat memperkuat pemahaman pengelola pengaduan sekaligus mendorong pengelolaan pengaduan yang lebih efektif dan responsif dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan.

Melalui keberlanjutan kegiatan Focal Point, Ombudsman Babel berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga pengaduan masyarakat tidak hanya ditangani, tetapi juga menjadi instrumen perbaikan kualitas pelayanan publik.